

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, hasil penelitian mengenai pengaruh upah minimum provinsi, investasi penanaman modal asing dan investasi penanaman modal dalam negeri terhadap kesempatan kerja formal di Indonesia tahun 2015 – 2024, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Kesempatan kerja di Indonesia tahun 2015 – 2024 cenderung meningkat, meskipun sempat terjadi penurunan pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Kesempatan kerja sektor formal juga masih belum mendominasi jika dibandingkan dengan sektor informal, dan belum tersebar secara merata di seluruh provinsi. Data menunjukkan bahwa sektor formal masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, khususnya Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, yang mencerminkan tingginya urbanisasi, konsentrasi penduduk, dan ketersediaan lapangan kerja formal. Sebaliknya, beberapa provinsi di luar Pulau Jawa seperti Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan Papua Barat memiliki kesempatan kerja formal terendah. Rendahnya pekerja formal di provinsi-provinsi tersebut diduga dipengaruhi oleh dominasi sektor informal, keterbatasan akses informasi lowongan pekerjaan formal, rendahnya kualitas tenaga kerja dan pendidikan, serta keterbatasan pemanfaatan teknologi dan infrastruktur. Dengan demikian, upaya peningkatan kesempatan kerja sektor formal di Indonesia masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan antarwilayah, dominasi sektor informal, dan kualitas tenaga kerja yang belum merata.
- 2) Upah minimum provinsi memiliki besaran yang berbeda di setiap provinsinya. Diketahui bahwa besaran rata-rata upah minimum provinsi tertinggi berada di Provinsi DKI Jakarta dan terendah berada di Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah minimum provinsi berpengaruh negatif signifikan terhadap kesempatan kerja sektor formal. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kenaikan upah minimum provinsi, maka semakin rendah kesempatan kerja sektor formal di Indonesia

pada tahun 2015 – 2024. Artinya, perubahan upah minimum provinsi sangat berdampak bagi kesempatan kerja sektor formal. Dengan demikian, penelitian ini sudah sesuai dengan teori *the demand for labor* yang menyatakan bahwa upah minimum berdampak negatif terhadap kesempatan kerja.

- 3) Investasi penanaman modal asing (PMA) di Indonesia pada tahun 2015 – 2024 menunjukkan tren fluktuatif, hingga mencapai puncaknya pada tahun 2024, sedangkan titik terendah terjadi pada tahun 2016. Investasi PMA masih terkonsentrasi di Pulau Jawa khususnya Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. Sementara di luar Jawa yakni Sulawesi Tengah dan Maluku Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi PMA berpengaruh positif signifikan terhadap kesempatan kerja formal. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai investasi PMA, maka semakin tinggi kesempatan kerja formal di Indonesia tahun pada tahun 2015 – 2024. Artinya, perubahan pada investasi PMA sangat berdampak bagi kesempatan kerja formal. Dengan demikian, penelitian ini sudah sesuai dengan teori *the demand for labor* yang menyatakan bahwa penanaman modal berpengaruh positif terhadap kesempatan kerja.
- 4) Investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Indonesia pada tahun 2015 – 2024 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, hingga mencapai puncaknya pada tahun 2024, sedangkan titik terendah terjadi pada tahun 2015. Investasi PMDN terbesar di Pulau Jawa berada di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur. Sementara di luar Jawa yakni Riau dan Kalimantan Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi PMDN berpengaruh positif signifikan terhadap kesempatan kerja formal. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai investasi PMDN, maka semakin tinggi kesempatan kerja formal di Indonesia tahun pada tahun 2015 – 2024. Artinya, perubahan pada investasi PMDN sangat berdampak bagi kesempatan kerja formal. Dengan demikian, penelitian ini sudah sesuai dengan teori *the demand for labor* yang menyatakan bahwa penanaman modal berpengaruh positif terhadap kesempatan kerja.

5.2 Impikasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka didapat beberapa implikasi yang perlu menjadi perhatian, diantaranya implikasi teoritis dan implikasi praktis, sebagai berikut:

1) Implikasi Teoritis:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah minimum provinsi berpengaruh negatif signifikan terhadap kesempatan kerja sektor formal, sehingga sepenuhnya mendukung teori *the demand for labor* yang menyatakan upah minimum berdampak negatif terhadap kesempatan kerja. Berikutnya, investasi penanaman modal asing (PMA) dan investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap kesempatan kerja sektor formal yang mendukung teori tersebut. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa variabel upah minimum provinsi, investasi PMA dan PMDN secara simultan mempengaruhi kesempatan kerja formal. Hal ini memperkaya literatur bahwa faktor investasi memiliki peran lebih besar dibanding variabel upah minimum dalam mendorong kesempatan kerja formal di Indonesia.

2) Implikasi Praktis:

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan upah minimum perlu disusun dengan mempertimbangkan kesejahteraan pekerja tanpa mengkhawatirkan kesempatan kerja sektor formal, karena buktinya pengaruhnya berdampak negatif signifikan. Di sisi lain, hasil penelitian ini menegaskan perlunya fokus pemerintah pada peningkatan iklim investasi, baik PMA maupun PMDN untuk memperluas kesempatan kerja sektor formal. Selain itu, dominasi kesempatan kerja sektor formal dan aliran investasi yang masih terpusat di Pulau Jawa menandakan adanya ketimpangan wilayah yang perlu diatasi melalui pemerataan pembangunan, penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas tenaga kerja, dan pemerataan informasi kesempatan kerja di provinsi luar Jawa. Pemerataan kesempatan kerja sektor formal ini juga diharapkan mampu mengurangi ketimpangan sosial ekonomi antarwilayah.

5.3 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan implikasi di atas, terdapat beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1) Bagi Pemerintah

Kebijakan upah minimum tetap perlu memperhatikan kesejahteraan pekerja, dan dalam praktiknya, pemerintah menetapkan kebijakan yang proporsional dan tepat, guna kebijakan upah minimum kedepannya dapat membawa pengaruh positif baik bagi pekerja maupun bagi perusahaan. Sehingga kebijakan tidak hanya menguntungkan satu pihak, melainkan berbagai pihak. Adapun, pemerintah pusat dan daerah perlu terus menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan regulasi, kemudahan perizinan, serta pembangunan infrastruktur pendukung investasi di luar Pulau Jawa. Berbagai *stakeholder* juga diharapkan dapat memperluas investasi ke luar Pulau Jawa dengan memanfaatkan potensi daerah lain, guna mendukung pemerintah dalam pemerataan kesempatan kerja formal. Selain itu, program pengembangan keterampilan dan kualitas tenaga kerja harus ditingkatkan, terutama daerah dengan dominasi sektor informal, agar pekerja lokal mampu mengisi lapangan kerja formal.

2) Bagi Masyarakat

Masyarakat sebagai angkatan kerja diharapkan dapat meningkatkan kualitas diri melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan sertifikasi keahlian agar mampu bersaing di sektor formal. Selain itu, masyarakat juga diharapkan proaktif memanfaatkan akses informasi lowongan kerja formal, terutama di daerah dengan dominasi sektor informal. Upaya penting ini perlu dilakukan agar tenaga kerja lokal dapat terserap di lapangan kerja formal yang tercipta dari adanya investasi. Dengan peningkatan kualitas SDM diharapkan masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi berperan aktif sebagai subjek pembangunan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi untuk daerah masing-masing. Masyarakat juga diharapkan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi dunia kerja yang semakin pesat. Penggunaan teknologi akan membuka peluang kerja baru.

3) Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan teori terbaru, sehingga hasil penelitian bisa relevan dengan kondisi saat ini. Selain itu, penelitian ini juga terbatas pada sektor formal. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan meneliti sektor informal. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat memasukan variabel kontrol sehingga cakupan penelitian tidak hanya terbatas pada variabel upah minimum dan investasi, melainkan beberapa variabel lainnya seperti PDRB, kualitas tenaga kerja, dan aspek sosiodemografi seperti tingkat pendidikan, umur, jenis kelamin dan status wilayah, guna memperluas cakupan penelitian.